

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Linda M. Sahono. (2012). Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Dan Implikasi Hukumnya. *Jurnal Perspektif*, 17, 92.
- Komisi Yudisial. (N.D.). Wewenang Dan Tugas. Komisiyudisial.Go.Id.
- Mas Achmad Santosa. (2005). Artikel: Menjelang Pembentukan Komsu Yudisial. *Harian Kompas*, 5.
- Nugraha, S. (2017). Pengawasan Kekuasaan Kehakiman Dalam Negara Hukum Indonesia (Vol. 3, Issue 2).
- Sudikno Mertokusumo, & A. Pitlo. (1993). Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum (Cet.1). Citra Aditya Bakti.
- Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Vol. 1, Issue 1).
- Wiriadi, W. (2014). Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim Di Indonesia. In *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* (Vol. 48, Issue 2).
- Angesti Anas Kapindha, R., Dwi M, S., & Rizky Febrina, W. (2014). Efektivitas Dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia (4th Ed.). *Privat Law 1 2*.
- Bambang Sugeng Ariadi Subagyo Dkk. (2014). "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono. *Jurnal Yuridika*, Xxix.

Jacqueline M. Nolan-Haley. (1991). *Alternative Dispute Resolution*. West Publishing Company.

B. Buku

Abdul Manan. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.

Adrian Sutedi. (2010). *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*,. Sinar Grafika,.

Ahmad Basuki. (2013). PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI UPAYA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PERADILAN PIDANA. *PERSPEKTIF*, XVIII(1), 61.

Ali Afandi. (2004). *Hukum Waris*. Rineka Cipta.

Andi Hamzah. (1984). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Penerbit Chalia Indonesia.

A.P. (1999). *Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP.No24/1997 dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998)* (cetakan pertama). CV.Mandar Maju.

Boedi Harsono. (2007). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya* (Edisi Revisi). Djambatan.

- Djoko Prakoso. (1987). *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Bina Aksara.
- Eddy OS.Hiarieej. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga.
- Effendi Perangin. (2013). *Hukum Waris*. Raja grafindo persada.
- Hanitijo Soemitro, R. (1982). *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Imam Anshori Saleh. (2014). *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Setara Press.
- Jonaedi Efendi. (2009). *Kamus Istilah Hukum Populer*. Kencana.
- K Wantjik Saleh. (1977). *Kehakiman dan Keadilan*. Ghalia Indonesia.
- Mahkamah Agung RI. (2005). *Naskah Akademis dan Rancangan Undang – Undang tentang Komisi Yudisial*,. 52.
- Martiman Prodjohamidjojo. (1983). *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Penerbit Chalia Indonesia.
- Munir Fuady. (2006). *Teori Hukum Pembuktian(Pidana dan Perdata)*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- R. Wirjono Prodjodikoro. (1980). *HUKUM WARISAN DI INDONESIA*. Sumur Bandung.
- Mr. Gregor van der Burgh. (1995). *Hukum Waris*. PT Citra Aditya Bakti,.

- Pruitt, D. G., Rubin, J. Z., & Soetjipto, H. P. (2004). *Teori Konflik Sosial*.
pustaka belajar.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (2003). *Metode Penelitian Hukum dan
Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*.
Rajawali Press.
- Soekanto Soerjono. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat*. Rajawali Press.
- Subekti. (2003). *Pokok-pokok Hukum Perdata*,. PT Intermasa.
- Sudarsono. (1994). *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. PT. Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. (2008). *Hukum dan Politik Agraria*. Karunika.
- Urip Santoso. (2011). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Kencana.
- Wirjono Prodjodikoro. (1974). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*.
Penerbit Sumur.
- Yuniarti, S. (2017). *RAGAM DAN BENTUK ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA*.
- Zainuddin Ali. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Sinar
Grafika.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok
Agraria

Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No
02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang
Panduan Penegakkan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang
Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan Rahmat
Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, Menimbang.
(N.D.).

D. Sumber lain

Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 13/PDT.G/2010/PN.Kbj

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 436/PDT/2011/PN.Mdn

Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1684K/PDT/2013

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 499PK/PDT/2016

Putusan Komisi Yudisial Republik Indonesia

Surat Keputusan Mahkamah Agung mengenai usul penjatuhan saksi